

BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Strategi Politik

1. Pengertian Strategi Politik

Strategi adalah ilmu tentang teknik atau taktik, cara atau kiat muslihat untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.¹ Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.² Jadi, strategi politik adalah ilmu tentang teknik, taktik, cara, kiat yang dikelola oleh politisi untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber kekuasaan, merumuskan dan melaksanakan keputusan politik sesuai yang diinginkan.

Strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik. Contohnya adalah pemberlakuan peraturan baru, pembentukan suatu struktur baru dalam administrasi pemerintahan atau dijalankannya program deregulasi, privatisasi atau desentralisasi.³ Tanpa strategi politik perubahan jangka panjang atau proyek-proyek besar sama sekali tidak dapat diwujudkan. Politisi yang baik berusaha merealisasikan

¹ Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Gitamedia Press, 2006), 448

² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 1992), 10-

11

³ Peter Scrooder, *Strategi Politik* (Jakarta: FNS, 2009), 5-6

rencana yang ambisius tanpa strategi, seringkali menjadi pihak yang harus bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi sosial yang menyebabkan jutaan manusia menderita.

Dalam kamus Webster New World Dictionary (1979), strategi dimaknai sebagai:

*The science of planning and directing military operations, skill in managing or planning by using stratagems, stratagem, plan, etc.*⁴

Tujuan dari setiap strategi bukanlah kemenangan yang dangkal, tapi perdamaian yang mendasar. Dalam istilah politik, 'perdamaian' ini berarti: penerangan program-program yang tepat dan reformasi. Jika tujuan jangka panjang. Strategi ini tidak tampak, misi bagi kemenangan akan tampak sebagai perjuangan bagi kekuasaan dan kekayaan pribadi, sebagai sebuah perjuangan untuk mencapai tujuan-tujuan selain tujuan yang telah ditetapkan.⁵ Tujuan akhir strategi politik adalah idealisme politik dan pragmatisme politik. Idealisme politik adalah bagaimana kebaikan dan kesejahteraan bersama bisa diraih dengan cara-cara yang beradab secara elegan. Pragmatisme politik adalah siapa yang mendapatkan apa, kapan, dimana, bagaimana dan mengapa atau dengan lain perkataan bagaimana kekuasaan bisa direbut dan dipertahankan. Dalam pragmatisme menggunakan realisme yang menghalalkan segala cara dan politisi dagang sapi.

⁴ M. Alfian Alfian, *Menjadi Pemimpin Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009) 301-302

⁵ "Strategi Politik Persiapan Pemilu", google.com (14 Februari 2010)

Dalam strategi politik sangat penting mengenal strategi komunikasi. Strategi komunikasi sangat penting sehingga membawa keuntungan yang jelas bagi seseorang, atau yang selama ini diabaikan oleh lawan. Citra yang diinginkan (*target image*) antara lain; dalam proses implementasi, kelemahan pemerintah dan satuan eksekutif terutama sekali terletak di bidang kehumasan, *target image* menetapkan landasan bagi pekerjaan kehumasan, dan semua tindakan kehumasan hanya bertujuan untuk menyebarluaskan citra ini dan menanamkannya dalam benak kelompok sasaran sasaran. Citra yang diinginkan (*target image*) Terkait dengan pilihan tema, Gaya, Cara konfrontasi dan Tawaran sumber daya manusia.⁶

2. Perencanaan Konseptual Strategi Politik

Sistematika 10 langkah strategi politik yaitu:⁷

a. Merumuskan Misi

Perumusan menjabarkan hal apa saja yang perlu direncanakan secara strategi. Hal ini harus mencakup tiga elemen yakni tujuan secara keseluruhan yang menguraikan posisi yang ingin kita capai melalui perencanaan strategi tersebut, alasan pentingnya pencapaian tujuan secara keseluruhan dan kerangka waktu (kurun waktu) dimana keseluruhan tujuan harus dicapai.

⁶ Dr. Rainer Adam, "Political Marketing:Strategi Membangun Konstituen dengan Pendekatan PR", google.com (14 Februari 2010), 4-6

⁷ Peter Scrooder, *Strategi Politik*, 28-40

Dalam sebuah strategi politik, misi dapat diartikan persetujuan atas suatu posisi tertentu, partisipasi dalam suatu tugas tertentu, dipilih sebagai kandidat. Dalam sebuah perencanaan karir politik, misi harus menyatakan untuk siapa strategi itu direncanakan. Dengan demikian misi dapat menetapkan suatu kerangka atau batasan.

Misi harus mengidentifikasi jangka waktu, hingga kapan keseluruhan sasaran harus dicapai, dan misi tidak boleh dirumuskan secara terlalu optimis sehingga menjadi tidak realitis.

b. Penilaian Situasional & Evaluasi

Analisis situasi dan evaluasi membahas fakta-fakta yang dikumpulkan, yang dikelompokkan ke dalam kekuatan dan kelemahan serta perkiraan kemungkinan keberhasilan yang terealisasi.

1) Pengumpulan Fakta

Pengumpulan fakta berarti pengumpulan fakta-fakta internal dan eksternal yang relevan. Fakta internal adalah fakta yang menyangkut organisasi sendiri. Fakta eksternal adalah fakta yang menyangkut para pekerja atau lingkungan di mana akan direalisasikan. Pembatasan antara fakta internal dan eksternal tidak terlalu mudah, tapi pembatasan dilakukan sebelum proses pengumpulan fakta dimulai, untuk menghindari munculnya kesalahpahaman. Fakta kompetitor atau pesaing adalah fakta yang berasal dari organisasi-organisasi, yang merupakan pesaing langsung dari organisasi kita

sendiri. Fakta lingkungan adalah fakta yang berasal dari masyarakat yang akan dijalankan.

2) Mengidentifikasi Kekuatan dan Kelemahan

Fakta-fakta telah terkumpul, secara sistematis digolongkan dan ditimbang berdasarkan kadar relevansi, ukuran, kepentingan dan urgensi. Setiap fakta diteliti untuk menentukan apakah fakta-fakta tersebut mendukung atau justru mengganggu pelaksanaan. Apabila sebuah fakta mendukung, fakta ini menjadi kekuatan. Sebaliknya, apabila mengganggu pelaksanaan, ia akan menjadi kelemahan.

3) Analisa Kekuatan dan Kelemahan

Kekuatan dan kelemahan sudah diketahui, maka keduanya harus dievaluasi. Setelah mengelompokkan mereka berdasarkan kadar kepentingan, perlu untuk menetapkan apakah kita memiliki pengaruh terhadap kelemahan-kelemahan tersebut dalam arti dapat mengeliminir atau setidaknya menguranginya.

Dalam menganalisa dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan kita, yang diperhadapkan dengan pesaing atau lawan dalam konteks perencanaan strategi politik dan mengamati lingkungan eksternal.

4) Umpan-Balik (*Feedback*)

Setelah menganalisa kekuatan dan kelemahan, langkah berikutnya adalah menentukan apakah dapat dicapai dalam kurun waktu

yang telah ditetapkan. Apabila analisa kekuatan dan kelemahan menunjukkan bahwa ada keuntungan strategis yang jelas sehingga kemenangan pasti dapat diperoleh, dan kelemahan cukup dapat dilindungi, maka tersebut memiliki kemungkinan untuk dapat dicapai.

c. Perumusan Sub-Strategi

Sementara langkah penilaian situasional lebih menyibukkan diri dengan keadaan dan situasi masa lalu, fokus kita harus bergerak maju ke depan untuk perumusan sub-strategi. Langkah-langkahnya sebagai berikut menyusun tugas-tugas, merumuskan strategi dan mengevaluasi strategi. Apabila penilaian situasional sudah selesai, menjadi jelas sesuatu yang telah dirumuskan akan dijalankan atau masih perlu direvisi.

1) Menyusun Tugas-Tugas

Berdasarkan analisa kekuatan dan kelemahan, lahirlah tugas-tugas yang harus diselesaikan. Tugas-tugas tersebut adalah meneliti kelemahan kita yang harus dieliminir, memberikan pertahanan dengan cara menutupi, mengalihkan perhatian yang harus dibangun, setelah itu menelaah kekuatan kita untuk menyerang lawan dan jika lawan menunjukkan kelemahan yang tidak berhubungan dengan kekuatan kita, maka kita harus membangun kekuatan ini.

2) Merumuskan Strategi

Pertama-tama harus memilih isu-isu yang diperhadapkan dengan pesaing atau lawan. Isu-isu ini hendaknya berupa isu atau

argumen yang membawa keuntungan yang jelas. Lingkungan di mana sebuah isu dijalankan memainkan peranan yang penting dalam penentuan isu dan memusatkan kekuatan serta semua penyerangan hanya satu isu dalam waktu tertentu saja.

3) Mengevaluasi Strategi

Masing-masing strategi yang dipilih untuk menyelesaikan tugas haruslah saling melengkapi. Mereka harus saling cocok, baik di tingkat sub-sub strategi maupun dalam strategi menyeluruh. Karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap strategi-strategi yang dipilih setelah strategi itu dirumuskan.

d. Perumusan Sasaran

Setelah sasaran diputuskan, tanggung jawab untuk memindahkan strategi ke unit-unit taktis, dan diimplementasikan melalui pembagian tugas. Strategi telah ditetapkan, maka pendekatan untuk memanfaatkan kekuatan terhadap kelemahan lawan dan untuk memecahkan kelemahan sendiri juga ditetapkan. Tujuan harus menggambarkan keadaan pada akhir sebuah proses dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ini harus dapat dicapai dan tidak boleh menjadi ilusi belaka. Tujuan sudah dirumuskan, masing-masing strategi harus direalisasikan dan dijalankan. Tujuan ini masing-masing harus dibagi ke dalam unit taktis yang bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan. Karena itu, kuantitas, kualitas, jangka waktu dan tanggung jawab harus ditetapkan setelah tujuan dirumuskan.

e. *Target Image* (Citra Yang Diinginkan)

Strategi untuk kegiatan kehumasan atau *Public Relations* (PR) dirumuskan dan diimplementasikan di tingkat “PR”, setelah keputusan mengenai “citra yang diinginkan” (*target image*) ditetapkan. Target image melukiskan citra yang diharapkan, yang hendak dicapai setelah dijalankannya rangkaian pekerjaan kehumasan yang panjang dalam kelompok target. Target *image* ditentukan oleh keputusan strategis mengenai perumusan tugas dan pilihan-pilihan yang berkaitan dengan isu, gaya, jenis konfrontasi dan orang-orang yang diperhitungkan.

f. Kelompok-Kelompok Target

Kelompok target adalah kelompok-kelompok masyarakat atau organisasi mereka yang penting untuk pencapaian misi. Kelompok ini perlu didekati dalam waktu yang telah ditetapkan. Kelompok ini diidentifikasi dengan menginterpretasikan keputusan strategis, khususnya tujuan taktis, dan melalui analisa citra yang diinginkan (*target image*). Apabila kelompok target telah didefinisikan, fondasi untuk implementasi strategi yang komunikatif ditetapkan. Fondasi ini dilengkapi dengan pesan kelompok target dan instrumen-instrumen kunci.

g. Pesan Kelompok Target

Kelompok target yang telah dibahas diatas membutuhkan informasi-informasi tertentu berdasarkan keputusan strategis yang telah diambil sebelumnya untuk memungkinkan bereaksi sesuai dengan apa

yang telah direncanakan secara strategis. Informasi ini dapat dikomunikasikan secara khusus dengan masing-masing kelompok target, dan tidak untuk semua kelompok target yang ada. Perlu diperhatikan bahwa pesan yang diteriam masing-masing kelompok target tidak boleh saling bertentangan. Perluasan pesan kelompok target merupakan instrumen yang kerap digunakan pada tahap akhir masa kampanye, untuk memberikan janji tertentu kepada kelompok pemilih tertentu.

h. Instrumen-Instrumen Kunci

Pemilihan instrumen kunci terutama berkaitan dengan aksi-aksi dan alat komunikasi yang akan digunakan. Instrumen-instrumen dan aksi ini disesuaikan secara khusus bagi kelompok target. Untuk itu ada syarat bahwa kelompok yang dijadikan kelompok target telah dikenali terlebih dahulu, karena setiap kelompok target hanya diraih melalui pendekatan atau komunikasi tertentu. Pemilihan instrumen-instrumen kunci yang akan digunakan sekaligus menghasilkan keputusan-keputusan penting yang berhubungan dengan sumber daya untuk mengimplementasikan strategi serta efektivitas kampanye. Keputusan ini, beserta kelompok target yang dipilih menjadi prasyarat keberhasilan pelaksanaan strategi.

i. Implementasi Strategi

Dalam pengimplementasikan strategi, faktor manusia dan faktor operasional perlu diperhitungkan. Sebelum implementasi strategi dilakukan terlebih dahulu perlu diambil keputusan mengenai tujuan taktis,

perumusan citra yang diinginkan, identifikasi kelompok target, pesan kelompok target dan instrumen kunci. Setelah itu baru lah peraturan untuk implementasi strategi perlu ditetapkan. Dalam mengimplementasikan strategi politik, faktor manusia menjadi signifikan untuk tiga aspek yaitu pimpinan politik, pimpinan partai yang bekerja penuh dan anggota partai yang bekerja paruh waktu atau sukarelawan. Hubungan antara ketiga pihak ini, kuantitas, kualitas, pendidikan, motivasi dan etika merupakan syarat awal bagi keberhasilan implementasi strategi. Sementara dalam bidang operasional, syarat awal untuk keberhasilannya tergantung pada prinsip-prinsip kecepatan, penyesuaian diri dan tipu daya.

j. Pengendalian Strategi

Pengendalian strategi terdiri dari dua elemen yang menentukan keberhasilan penerapan suatu strategi. Elemen yang pertama adalah prinsip pengumpulan data intelijen dan perolehan informasi. Elemen yang kedua adalah prinsip perlindungan informasi di pihak sendiri.

Setelah itu dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT, yakni *Strength, Weakness, Opportunities, Threats* yang berarti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Sementara SWOT membatasi diri pada penilaian situasi dan perumusan strategi yang bergerak lebih jauh pada evaluasi strategi dan terutama pelaksanaannya.⁸

⁸ Ibid, 11-13

Langkah strategis yang utama, selain mengukur diri dengan analisis SWOT, adalah pengumpulan informasi secara objektif. Hal ini perlu terutama untuk mengidentifikasi para pesaing dan bisa di dapat dari informasi dari kubu pesaing, spionase, analisis survei, analisis media, penjelasan dari aliansi pesaing. Selain itu, juga perlu secara jelas mengetahui aturan main yang tertuang dalam produk perundang-undangan yang berlaku.⁹

3. Jenis-Jenis Strategi Politik

Politisi akan selalu dihadapkan pada berbagai kemungkinan kerjasama dengan pihak lain. Oleh karena itu, kita perlu mengenal sebelas strategi utama yang diperkenalkan oleh Peter Schroder yaitu: strategi *defect*, strategi *cooperate*, strategi *random*, strategi *per kind*, strategi *per nasty*, strategi *spite*, strategi *soft majority*, strategi *tit for tat*, strategi *mistrust*, strategi *prober*, dan strategi pavlov.¹⁰

a. Strategi *Defect*

Strategi "*Defect*" adalah menolak untuk bekerja sama dalam setiap langkah yang diambil. "*Defect*" merupakan sebuah strategi yang sangat sederhana, yang senantiasa menolak untuk bekerjasama secara buta namun sekaligus mengejar sasaran. Jelas terlihat bahwa "*Defect*" tidak dapat dikalahkan. Tidak ada strategi lain yang apabila dibandingkan

⁹ M. Alfian Alfian, *Menjadi Pemimpin Politik*, 302-303

¹⁰ Peter Scrooder, *Strategi Politik*, 129-131

secara langsung dapat mengumpulkan lebih banyak poin dibandingkan ”*Defect*”, karena lawan hanya dimungkinkan untuk memperoleh hasil bekerja sama atau tidak bekerja sama.

b. Strategi *Cooperate*

Strategi ”*Cooperate*” adalah strategi yang menjelaskan bekerja sama dalam setiap langkah yang diambil. Strategi merupakan lawan dari strategi ”*Defect*” dan memiliki sifat-sifat yang berlawanan. ”*Cooperate*” tidak dapat menang karena ia hanya bisa mencapai beberapa poin atau tidak memperoleh poin, dimana dalam kasus ini poin yang diperoleh tidak dapat lebih banyak daripada poin lawan. Apabila lawan mau kerja sama, maka strategi ini tidak akan merugikan, namun karena strategi buta ini, ”*Cooperate*” sangat mudah ’dimanfaatkan’.

c. Strategi *Random*

Strategi ”*Random*” adalah strategi yang posisinya ditengah-tengah menerima atau menolak. Contohnya; lemparlah uang logam, undilah kalau dapat sisi A berarti Anda harus bekerja sama dan kalau dapat sisi B sebaliknya. ”*Random*” memainkan ”*Defect*” atau ”*Cooperate*” dengan probabilitas yang sama. Tidak ada strategi yang bertujuan melakukan kerjasama secara permanen dapat berhasil dengan menggunakan langkah ”*Random*”. Jadi, apabila strategi ini tidak dimainkan secara buta, ia tidak akan mudah bekerjasama. Dengan demikian, adalah mustahil untuk mencapai secara konsisten.

d. Strategi *Per Kind*

Strategi *Per Kind* adalah strategi yang menggunakan Bermainlah secara periodik (bekerja sama, menolak bekerja sama). Strategi ini dimaksudkan untuk membuai lawan agar merasa aman, lalu Anda menyerang, supaya Anda tetap mampu mengendalikannya. Dengan harapan bahwa ia akan menerima penolakan untuk bekerjasama dalam hal yang terjadi saat itu, untuk kemudian mau diajak bekerjasama kembali.

e. Strategi *Per Nast*

Strategi *Per Nasty* adalah Bermainlah secara periodik (menolak bekerja sama, menolak bekerja sama, bekerja sama). Sama seperti strategi per kind, hanya polanya diubah. Strategi ini awalnya tidak menerima kerja sama dengan lawannya tetapi diakhirnya menerima kerjasama dengan pesaingnya.

f. Strategi *Spite*

Strategi "*Spite*" adalah Bekerja sama dalam langkah yang pertama, kemudian bekerja sama selama lawan belum menolak bekerja sama, setelah itu senantiasa menolak bekerja sama.

Ini adalah strategi pertama yang mempertimbangkan respon lawan. Strategi ini adalah strategi yang bersahabat yang menawarkan kooperasi, tetapi kemudian segera mengubah sikapnya ketika lawan tidak lagi kooperatif. Strategi ini dapat dideskripsikan dengan kata "*Cooperate*", dengan mekanisme pertahanan untuk mencegah terjadinya eksploitasi atau

pemanfaatan. Namun "*Spite*" tidak berusaha untuk mencapai pesaingnya. Ada variasi "*Spite*" dimana perubahan sikap baru diambil setelah lawan melakukan dua atau lebih upaya penipuan.

g. Strategi *Soft Majority*

Artinya mainkan langkah yang paling sering digunakan oleh lawan, dan apabila langkah yang diambil serupa, bekerjasamalah. Strategi ini menggunakan melihat dan mengambil strategi yang digunakan lawannya setelah itu digunakan dan ditambah dengan strategi yang lebih baik untuk memenangkan.

Strategi ini berusaha menghindari pemanfaatan yang terus menerus, dengan cara merespon tindakan lawan yang cenderung tidak mau bekerjasama, antara lain dengan terang-terangan menolak kerjasama. Langkah ini memiliki keuntungan dengan diteruskannya kerjasama dengan pihak lawan yang siap untuk bekerjasama. Tapi kerugiannya adalah bahwa kita cenderung mudah ditipu, misalnya melalui "*Per nasty*"

h. Strategi *Tit For Tat*

Strategi "*Tit For Tat*" adalah Bekerjasama dalam langkah yang pertama dan dalam setiap langkah berikutnya, mainkan langkah yang dipergunakan lawan terakhir kali.

Strategi ini adalah salah satu yang mau bekerjasama tetapi bertahan dengan melawan usaha-usaha pemanfaatan yang dilakukan lawan. Pada saat yang sama, strategi ini tidak bersifat mendendam melainkan

menjawab kesediaan bekerjasama kembali jika ada tawaran untuk bekerjasama lagi. *"Tit For Tat"* tidak dapat menang karena tidak pernah menolak kerjasama tanpa motivasi, dan dengan demikian tidak pernah berusaha mencapai poin yang unggul. Di pihak lain, strategi ini juga tidak dapat ketinggalan lebih dari poin yang unggul, karena ia hanya membiarkan dirinya dimanfaatkan satu kali saja.

i. Strategi *Mistrust*

Strategi *"Mistrust"* adalah Menolak bekerjasama dalam langkah yang pertama, kemudian mainkan sama halnya dengan strategi *"tit for tat"*. *"Mistrust"* sama sekali tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena strategi ini sejak awal sudah menolak untuk bekerjasama. Oleh karena itu, bergantung pada inisiatif lawan untuk memulai sebuah kerjasama. Seterusnya sama dengan *"Tit For Tat"*.

j. Strategi *Prober*

Strategi *"Prober"* adalah Mainkan tiga langkah awal (bekerja sama, bekerja sama, menolak bekerja sama), kemudian menolak bekerja sama dalam setiap langkah berikutnya, apabila lawan bekerjasama dalam langkah kedua dan ketiga.

Di sini strategi lawan akan diuji terlebih dahulu. Jika strategi lawan membiarkan dirinya untuk dimanfaatkan, *"Prober"* mengambil langkah lebih lanjut untuk menolak bekerjasama. Langkah ini akan mengarahkan pada suatu sikap dasar yang agresif, yang bagaimanapun

akan berubah menjadi sikap yang kooperatif. Apabila lawan tampil lebih cerdas (*"Tit For Tat"*), karena jika tidak, hanya poin sedikit saja yang dapat diperoleh.

k. Strategi *Pavlov*

Strategi *"Pavlov"* adalah Bekerja sama hanya dalam langkah pertama, setelah itu hanya apabila kedua pemain mengambil langkah yang sama.

"Pavlov" memiliki dasar pemikiran yang sama seperti *"Tit For Tat"*, tetapi memiliki tuntutan yang lebih tinggi terhadap kesediaan diri sendiri untuk bekerjasama. Hanya jika kerjasama yang telah dilakukan berhasil, maka akan dilakukan kerjasama lebih lanjut. Ini berarti, jika ada upaya pemanfaatan yang dilakukan lawan, strategi akan bereaksi dengan tidak mau bekerjasama, dan selanjutnya tidak akan melakukan upaya untuk kembali bekerjasama.

Pemimpin politik harus pandai mengembangkan alternatif, tidak pendek pikir atau cepat menyerah. Selain disebutkan diatas, masih ada strategi lain: Strategi bumi hangus adalah strategi yang menumpas lawan atau musuh sampai akar-akarnya tanpa ampun dan tanpa mengakomodasikan kembali. Strategi *brinkmanship* atau strategi permainan jurang. Strategi ini dimaksudkan untuk mengarahkan musuh ke ambang bencana untuk bisa ikut masuk ke dalam jurang bersama lawan dan Penerapannya harus hati-hati dan jeli. Strategi kejutan adalah Keberhasilannya terletak pada betapa tidak

siapnya musuh menghadapi yang kita buat. Strategi disinformasi adalah Strategi ini terkait dengan manipulasi informasi, yakni dengan memberikan informasi yang salah atau *ngawur* (cocok dalam konteks ofensif), atau memberikan informasi secara berlebihan (cocok dalam konteks defensif). Strategi pengakuan atau sentakan pembebasan adalah bentuk strategi defensif untuk mengakhiri perdebatan atau polemik yang berlarut-larut. Pengguna strategi ini berharap akan memperoleh simpati publik.¹¹

4. Pendekatan Yang Penting Dalam Strategi Politik

Pendekatan dan komunikasi politik perlu dilakukan para kontestan untuk dapat memenangkan pemilu. Para kontestan perlu melakukan kajian untuk mengidentifikasi besaran (*size*) pendukungnya, massa mengambang dan pendukung kontestan lainnya. Identifikasi ini perlu dilakukan untuk menganalisis kekuatan dan potensi suara yang akan diperoleh pada saat pencoblosan, juga untuk mengidentifikasi strategi pendekatan yang diperlukan terhadap masing-masing kelompok pemilih. Strategi ini dipikirkan oleh setiap kontestan karena pesaing juga secara intens melakukan upaya-upaya untuk memenangkan persaingan politik. Sementara itu, cara masyarakat menentukan pilihannya juga tergantung pada karakteristik masyarakat bersangkutan. Disatu sisi terdapat kelompok masyarakat yang lebih menggunakan logika

¹¹ Alfian Alfian, *Menjadi Pemimpin Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 304-305

dan rasionalitas dalam menimbang kontestan. Kemampuan kontestan dalam memecahkan persoalan masyarakat menjadi titik perhatian kelompok masyarakat ini. Di pihak lain, kedekatan ideologis juga menjadi kekuatan untuk menarik pemilih ke dalam bilik suara dan mencoblos kontestan yang berideologi sama. Pemilih jenis ini tidak begitu memedulikan program kerja apa yang ditawarkan oleh partai politik bersangkutan. Asal ideologi partai tersebut sama dengan ideologi pemilih, sudah cukup alasan baginya untuk memilih kontestan ini. Bauran antara karakteristik alasan yang dipakai untuk menentukan pilihan dengan segmen-segmen pemilih dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

	Pembagian Pemilih		
	Konstituen	Non-partisan	Pendukung lain
Problem-solving	Penguatan dan proteksi secara rasional	Peyakinan secara rasional	Pengenalan dan merebut secara rasional
Ideologi	Penguatan dan proteksi secara ideologis	Peyakinan secara ideologis	Pengenalan dan merebut secara ideologis

Konstituen, non partisan dan pendukung pesaing membutuhkan pendekatan yang berbeda satu dengan yang lain. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang diwakili dan memiliki kedekatan dengan suatu partai politik. Kelompok masyarakat yang diwakili dan memiliki kedekatan dengan suatu partai politik. Kelompok masyarakat ini merupakan basis pendukung kelompok konstituen. Konstituen memiliki loyalitas yang paling tinggi dibandingkan dengan jenis

pemilih yang lain. Sementara non partisan adalah massa menggambang yang masih belum memutuskan partai politik apa yang akan didukung. Non-partisan tidak mengikatkan diri dengan suatu partai politik apa pun. Biasanya jenis pemilih ini akan menjatuhkan pilihannya di akhir periode kampanye. Atau, pemilih ini malahan tidak memilih siapa pun karena tidak melihat satu pun dari pilihan kontestan yang sesuai dengan harapan pemilih ini. Jenis pemilih terakhir adalah pendukung atau konstituen partai politik lain. Suatu partai politik atau kontestan individu juga perlu mengembangkan hubungan dengan pendukung partai lain. Hal ini dilakukan karena kontestan pemilu perlu menjaga stabilitas dan situasi yang aman semasa periode kampanye. Memberikan informasi kepada pendukung partai lain berkontribusi untuk mendinginkan suasana persaingan. Selain itu, kesan positif perlu dimunculkan kepada pendukung lain. Sangat dimungkinkan pendukung lain akan memberikan suaranya kepada suatu partai politik apabila terdapat konsesi dan aliansi strategis di antara dua partai politik.¹²

Strategi penguatan sangat dibutuhkan dalam hubungan antara partai politik dengan konstituen partai politik. Hal ini dilakukan agar ikatan baik antara pemilih yang bersifat rasional maupun emosional tetap terjaga. Sangat diharapkan ikatan politik antara partai politik dengan konstituen justru semakin tinggi. Strategi penguatan dilakukan juga agar ikatan di antara partai politik tidak melemah dan untuk menghindari masuknya pengaruh pesaing

¹² Firmanzah, *Marketing Politik* (Jakarta:Obor, 2008), 109-110

yang bisa menarik perhatian konstituen partai politik. Pendekatan yang dipergunakan tentu saja berbeda, tergantung pada apakah konstituen lebih mengedepankan aspek rasional atau ideologis. Partai politik perlu menggunakan penguatan yang bersifat rasional ketika partai politik berhadapan dengan konstituen yang lebih mengedepankan problem-solving. Ketika partai politik harus berhubungan dengan konstituen yang lebih melandaskan alasan memilih pada aspek-aspek non rasional, penguatan ideologi perlu dilakukan. Mengingat pesan, nilai, norma, dan paham partai perlu ditekankan dalam hal ini.¹³

Strategi menanamkan keyakinan lebih sesuai untuk diterapkan pada jenis pemilih yang non-partisipan. Kepada jenis pemilih ini perlu diyakinkan bahwa secara problem-solving ataupun ideologis, kontestan bersangkutan lebih baik dibandingkan dengan para pesaingnya. Strategi komunikasi dan penyediaan informasi juga perlu dilakukan untuk meyakinkan para pemilih non-partisipan. Kontestan harus menarik mereka keluar dari kebimbangan. Hal ini sulit dilakukan tanpa adanya proses yang mencoba memberikan informasi dan meyakinkan non-partisan untuk memberikan suaranya kepada suatu partai politik tertentu. Hal-hal yang hendak diyakinkan sangat tergantung pada karakteristik pemilih non-partisan ini. Apabila non-partisan lebih melihat aspek rasional, proses keyakinan dilakukan secara argumentatif dan dilandaskan pada penyediaan data dan informasi yang dapat dipercaya.

¹³ Ibid..., 110-111

Aspek berfikir logis perlu dikomunikasikan kepada pemilih non-partisan yang berorientasi problem-solving. Sementara itu, bagi jenis pemilih non-partisan lain, komunikasi ideologi lebih ditekankan, karena jenis ini tidak begitu memperhatikan aspek rasional dan logis suatu partai politik. Yang perlu dilakukan adalah membuat pemilih jenis ini merasa yakin bahwa ideologi partai politik bersangkutan sesuai dengan mereka. Atau juga bisa sebaliknya, bagaimana menarik dan menggeser ideologi pemilih non-partisan agar sesuai dengan ideologi suatu partai politik. Untuk cara yang terakhir ini memang lebih membutuhkan waktu. Cukup sulit untuk mengubah ideologi seseorang, tapi hasilnya akan lebih langgeng daripada menyesuaikan diri dengan ideologi para pemilih. Menyesuaikan diri dengan para pemilih bisa menimbulkan kesan sikap yang plin-plan.¹⁴

Strategi pengenalan dan merebut dapat dilakukan suatu partai terhadap jenis pemilih yang merupakan pendukung partai lain. Pengenalan perlu dilakukan agar pendukung partai lain ini tidak memandang negatif. Bagaimanapun, penciptaan iklim yang harmonis merupakan tanggung jawab bersama, perlu ditekankan dalam hal ini bahwa meskipun secara ideologi dan problem-solving berbeda, bukan berarti perbedaan itu menjadi musuh. Permainan politik hanyalah suatu permainan yang berujung pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Selama proses dan setelah proses tersebut, stabilitas bangsa dan negara menjadi jauh lebih penting dibandingkan hanya

¹⁴ Ibid...., 111-112

kepentingan untuk berkuasa. Dengan demikian, pendukung partai lain perlu didekati untuk mewujudkan situasi persaingan yang damai. Masing-masing partai politik berkepentingan untuk memperbesar porsi dukungan mereka, termasuk menggaet pendukung partai lain. Dalam strategi ini, meskipun bukan menjadi prioritas, perlu selalu dipikirkan aktivitas yang dapat menarik perhatian pendukung partai lain. Kedua strategi ini diterapkan dengan pendekatan problem-solving maupun ideologis. Tujuan utama pesaing adalah timbulnya perilaku migrasi dan perpindahan. Mengingat biaya yang harus dikeluarkan untuk strategi ini sangat mahal. Biasanya pertempuran untuk memperbesar dukungan terjadi dalam upaya memperebutkan massa mengambang. Massa mengambang masih belum menentukan pilihannya kepada suatu partai politik apa pun, sehingga kemungkinan untuk menarik mereka ke suatu partai politik akan lebih tinggi dibandingkan dengan menarik pendukung partai lain.¹⁵

Dalam hal ini strategi politik sangat penting bagi para caleg untuk memperebutkan kursi kekuasaan Legislatif dalam mendekati rakyat. Oleh karena itu idealnya para Caleg menggunakan cara *high level politics* yang mengutamakan kebaikan dan kesejahteraan bersama untuk meraih kekuasaan.

Sifat-sifat yang diharapkan dianggap penting dan harus dimiliki oleh seorang politikus adalah dapat dipercaya, memiliki pandangan ke depan,

¹⁵ Ibid...., 112

kompeten dalam bidangnya, pantang mundur, dapat memperjuangkan kepentingan dan dekat dengan masyarakat.

B. Pemilihan Umum (Pemilu)

1. Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilu sebagai alat demokrasi yang berarti memposisikan pemilu dalam fungsi asasi sehingga wahana pembentuk *representative government*.¹⁶ Menurut UUD 1945 dan Amandemen pasal 22E pengertian pemilu adalah sebagai berikut:

- a. Pemilu adalah dilaksanakan secara langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- b. Pemilu adalah di selenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Desa, presiden, wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Pemilu adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu partai politik.
- d. Pemilu adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Desa melalui perseorangan.
- e. Pemilu adalah di selenggarakan oleh suatu komisi pemilu untuk bersifat nasional, tetap dan mandiri.¹⁷

¹⁶ M. natsir, *Evaluasi Pemilu Orde Baru* (Bandung: Nizan, 1997), 15

¹⁷ UUD 1945 dan Amandemen (Surabaya: Karya Utama, 2004), 14

Dengan demikian, pemilihan umum (Pemilu) adalah suatu alat yang bersifat demokratis untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat, kekuasaan yang lahir dengan pemilu adalah kekuasaan yang lahir dari bawah, menurut kehendak dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat.

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah di amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Jadi, ditengah masyarakat pemilu lebih sering merujuk kepada pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan setiap lima tahun sekali.¹⁸

2. Sistem Pemilihan Umum (Pemilu) dan Sistem Kepartaian di Indonesia

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilu, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok yaitu *single-member constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil yang disebut sistem distrik) dan *multi-member constituency* (satu daerah pemilihan memilih

¹⁸ Rumidan Rabi'ah, *Lebih Dekat Dengan Pemilu di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Cilik, 2009),46-47

beberapa wakil, biasanya dinamakan *propotional reprresentation* atau sistem perwakilan berimbang).¹⁹

1) Sistem Distrik

Sistem distrik adalah sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat. Untuk keperluan itu negara dibagi dalam sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat dalam dewan perwakilan rakyat ditentukan oleh jumlah distrik.²⁰

Kelebihan dari sistem distrik adalah karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh penduduk distrik, sehingga hubungannya dengan penduduk distrik lebih erat, sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu, berkurangnya partai dan meningkatnya kerjasama antara partai-partai mempermudah terbentuknya pemerintah yang stabil dan mempertingkat stabilitas nasional dan sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan.²¹

Kekurangan sistem ini adalah kurang menguntungkan bagi partai kecil dan golongan minoritas, kurang *representatives*, calon yang kalah

¹⁹ Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), 177

²⁰ Ibid., 177

²¹ Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 178

dalam suatu distrik kehilangan semua suara yang mendukungnya (banyak suara yang hilang) dan bisa terjadi kesenjangan antara jumlah suara yang diperoleh atas parlemen, menguntungkan partai besar.²²

2) Sistem Perwakilan Berimbang

Sistem perwakilan berimbang adalah jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu golongan atau partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya. Dalam sistem ini setiap suara dihitung, dalam arti bahwa suara lebih yang diperoleh oleh sesuatu partai atau golongan dalam sesuatu daerah pemilihan dapat ditambahkan pada jumlah suara yang diterima oleh partai atau golongan itu dalam daerah pemilihan lain, untuk menggenapkan jumlah suara yang diperlukan guna memperoleh kursi tambahan.²³

Kelebihan sistem perwakilan berimbang adalah dianggap demokratis dan representatif, oleh karena semua aliran yang ada dalam masyarakat terwakili dalam parlemen, sedangkan jumlah wakil dalam badan itu sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh dari masyarakat dalam masing-masing daerah pemilihan dan dianggap lebih adil karena golongan kecil sekalipun mempunyai kesempatan untuk mendudukkan wakil dalam departemen. Wakil rakyat yang dipilih dengan cara ini

²² Rumidan Rabi'ah, *Lebih Dekat Dengan Pemilu di Indonesia*, 67

²³ Ibid...., 178-179

diharapkan lebih cenderung untuk mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan daerah.²⁴

Kekurangan sistem perwakilan berimbang adalah mempermudah fragmentasi partai dan menimbulkan kecenderungan kuat dikalangan anggota untuk memisahkan diri dari partainya dan membentuk partai baru, wakil yang terpilih merasa dirinya lebih terikat kepada partai daripada kepada daerah yang mewakilinya disebabkan partai lebih menonjol perannya daripada kepribadian seseorang, banyaknya partai yang bersaing menyulitkan suatu partai untuk meraih mayoritas (50%+1) yang perlu membentuk suatu pemerintahan dan biasanya sistem perwakilan berimbang dikombinasikan dengan beberapa prosedur lain, antara lain dengan sistem daftar (*list system*), kemudian dibagi lagi menjadi sistem daftar tertutup dan sistem daftar terbuka.²⁵

Sistem pemilu dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia telah mengalami begitu banyak perdebatan dan perubahan. Kerumitan permasalahan dan beragam pertimbangan yang kemudian mengantarkan Indonesia untuk memilih salah satu sistem yang diterapkannya.

Pada masa berlakunya sistem parlementer, kombinasi yang digunakan adalah sistem pemilu propotional representation dan sistem politik multipartai. Pada masa ini, tidak hanya partai yang diberikan kesempatan

²⁴ Rumidan Rabi'ah, *Lebih Dekat Dengan Pemilu di Indonesia*, 65

²⁵ Ibid.... 65

menjadi kontestan pemilu, tapi perorangan juga diberi kesempatan untuk mencalonkan diri. Pemilu pada era ini dianggap sebagai pemilu yang paling demokratis selama pemerintahan di Indonesia.²⁶

Pada masa Orde Baru dengan sistem pemerintahan presidensialisme, menerapkan sistem pemilihan proposional dengan daftar tertutup kombinasi dengan sistem multipartai yang berangsur-angsur disederhanakan. Selain sistem proposional tertutup yang digunakan, modifikasi sistem pemilihan yang digunakan Orde Baru adalah melalui pengangkatan utusan golongan atau daerah.²⁷

Sejalan dengan tuntutan reformasi, maka keberadaan lembaga perwakilan yang benar-benar mencerminkan representasi kedaulatan rakyat yang merupakan sebuah kebutuhan yang tak terelakkan. Lembaga perwakilan yang pengisian keanggotaannya dipilih langsung oleh rakyat adalah bentuk rasionalisasi dari prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Sistem pemilu yang dianut adalah sistem proposional (perwakilan berimbang) dengan daftar calon terbuka untuk memilih DPR dan DPRD, sedangkan untuk memilih DPD menggunakan sistem distrik berwakil banyak. Sistem pemilu ini digunakan sebagai evaluasi sistem yang diterapkan pada masa Orde Baru dengan harapan

²⁶ Ibid...., 62

²⁷ Ibid...., 62-63

rakyat agar pemilihan calon yang diajukan oleh partai politik lebih dikenal pemilihnya.²⁸

Konsep yang berkaitan erat dengan Badan Perwakilan Rakyat adalah beberapa sistem pemilu. Hal ini disebabkan salah satu fungsi sistem pemilu adalah mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi anggota Badan Perwakilan Rakyat atau menjadi kepala pemerintahan.

Oleh karena itu, berikut ini diuraikan sistem pemilu yang mengandung tiga variabel pokok yaitu sebagai berikut:

a. Penyuaran

Penyuaran adalah tata cara yang harus diikuti pemilih yang berhak dalam memberikan suara pilihan yang dihadapi pemilih terdiri atas tiga kemungkinan yakni memilih partai, memilih calon, dan keduanya (partai politik dan daftar calonnya).

b. Daerah Pemilihan (*Electioral District*)

Daerah pemilihan adalah ketentuan yang mengatur beberapa jumlah kursi wakil rakyat untuk setiap daerah pemilihan. Dalam menentukan daerah pemilihan ini. Setidak-tidaknya dua faktor harus dipertimbangkan yakni wilayah administrasi pemilihan jumlah penduduk.

²⁸ Ibid...., 63

c. Formula Pemilihan

Formula pemilihan adalah rumus yang digunakan untuk menentukan siapa atau partai politik apa yang memenangkan kursi di suatu daerah pemilihan.

Ketiga variabel itu bersifat saling berhubungan, dari ketiga variabel ini, variabel yang terpenting karena kedua variabel lainnya ada kalanya merupakan konsekuensi logis dari yang pertama. Itu sebabnya setiap sistem pemilu ditandai dengan formula pemilihan yang digunakan.²⁹

3. Tujuan Pemilihan Umum (Pemilu)

Dalam rangka mewujudkan penyusunan tata kehidupan yang dijiwai semangat cita-cita revolusi, kemerdekaan Republik Indonesia proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana dalam Pancasila atau UUD 1945, maka penyusunan tata kehidupan itu haruslah dilakukan dengan jalan pemilihan umum (pemilu). Adapun tujuan pemilihan umum adalah:

- a. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum yang sesuai dengan prinsip demokrasi yang memandang rakyat yang berdaulat, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh wakil-wakilnya.

²⁹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 1992), 176-178

- b. Sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari rakyat atau masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai-partai memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
- c. Pemilu merupakan sarana memobilisasi dan menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Tujuan yang ketiga ini tidak hanya berlaku di negara berkembang, tetapi juga di negara-negara yang menganut demokrasi liberal (negara-negara industri maju) kendati sifatnya berbeda³⁰

4. Hakikat Pemilihan Umum (Pemilu)

- a. Menyusun Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat untuk mewujudkan susunan tata kehidupan yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Memilih wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawakan isi hati nurani dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan guna memenuhi dan mengemban amanat penderitaan rakyat.
- c. Tidak sekedar memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk dalam Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

³⁰ *Ibid*, 179

- d. Pemilihan Umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh merusak sendi-sendi demokrasi, tetapi menjamin suksesnya perjuangan Orde Baru, yaitu tegaknya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- e. Tidak untuk menyusun negara baru dengan falsafah negara baru.
- f. Menjamin kesinambungan Pembangunan Nasional.³¹

Pemilu pada hakekatnya merupakan pengakuan perwujudan hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Dilihat dari formula lain, pemilu merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila (demokrasi Pancasila) dalam Negara Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga perwakilan rakyat yang membawa isi hati nurani rakyat.³²

Oleh karena itu, tiap warga negara berhak hidup menurut cara, gaya, tempo, dan keinginannya sendiri tetapi perlu diingat bahwa hak-hak itu tidak bersifat mutlak, mempunyai hak dan menggunakan hak adalah dua perkara. Dalam menggunakan hak itu kepentingan nasional sedikitpun tidak boleh dilupakan.³³

³¹ Parulian Donald, *Mengugat Pemilu*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), 9-10

³² M. Rusli Karim, *Pemilu Demokrasi Kompetitif* (Yogyakarta; PT. Tiara Wacana Yogya, 1991), 2

³³ M. Hutahuruk, *Azas-Azas Ilmu Negara* (Jakarta: Erlangga, 1983) , 46

5. Pemilihan Umum di DPRD Kabupaten/Kota

Pemilu tahun 2009 merupakan pemilu yang kedua di Indonesia yang menggunakan sistem yang berbeda dengan pemilu sebelumnya. Pemilu kali ini di adakan dua kali pemilu yang pertama untuk memilih anggota legislatif (DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota) 9 April 2009 dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sedangkan pada 8 Juli 2009 untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden.

Dalam pemilu di DPRD Kab/kota di Sidoarjo ada 44 partai dan tiap partai ada masing-masing kandidat untuk menduduki jabatan di kursi DPRD tingkat II. Salah satu partai politik yang ada di Sidoarjo adalah PKB. Masyarakat Sidoarjo kebanyakan adalah warga Nadhliyin (NU) yang lari ke PKB. Hal ini yang dibuktikan dengan masih kental kegiatan NU dan banom-banom NU yang aktif dan berjalan rutin tiap minggu dan tiap bulan di Sidoarjo.

Namun, Perolehan suara PKB Sidoarjo pada pemilu 2009 ini merosot tajam dibandingkan Pemilu 2004, telah meraih 16 kursi di DPRD Sidoarjo. Sedangkan Perolehan suara PKB Sidoarjo pada pemilu 2009 mendapat 10 kursi. Hal ini terbukti dari hasil perolehan suara yang mengalami penurunan dari pemilu 2004 memperoleh 43.166 suara menjadi 7.000 suara. Penurunan suara tersebut dipengaruhi oleh konflik internal pada PKB, pecahnya PKB, penurunan kepercayaan warga NU Sidoarjo terhadap PKB dan perubahan sistem pemilu dari sistem proposional menjadi distrik.

C. Kerangka Teori

Mengidentifikasi strategi pendekatan yang diperlukan terhadap masing-masing kelompok pemilih. Strategi ini perlu dipikirkan oleh setiap kontestan karena pesaing juga secara intens melakukan upaya-upaya untuk memenangkan persaingan politik.³⁴

Penulis menggunakan teori *habitus* dan *field* sebagai pisau analisis terhadap penelitian. Dalam teori *habitus* dan *field* yang dikemukakan oleh Pierre Bourdeu adalah *habitus* berasal dari *habitation* yang artinya habitat dan situasi yang mencakup strategi politisi. Strategi politisi dalam mengkampanyekan dirinya kepada masyarakat yang menggunakan situasi didaerahnya. Sedangkan *field* berarti ranah, lingkungan dan wilayah yang digunakan untuk menganalisis strategi politik yang digunakan para caleg didaerah masing-masing. Dari sinilah strategi para politisi dapat dilihat dan dianalisis *habitus* dan *field* terbentuk untuk meningkatkan kekuasaan para caleg.

Selain itu penulis juga menggunakan teori hegemoni yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci digunakan dalam penelitian. Hegemoni diartikan sebagai praktik kepemimpinan budaya yang dilakukan oleh *rulling class*.³⁵ Teori ini bercorak pragmatis dalam orientasi, sehingga pendekatan yang dipilih lebih mengarah kepada upaya pendekatan manajemen dan pendekatan massa yang dilakukan para elite politik untuk mendekati masyarakat dalam memperkenalkan

³⁴ Firmanzah, *Marketing Politik* (Jakarta: Obor, 2008), 109

³⁵ Zainudin Maliki, *Narasi Agung*, 186

dirinya. Para strategi politisi menggunakan teori ini ketika masyarakat kebingungan dalam memilih pemimpin yang layak dan memperjuangkan nasib rakyat. Setiap kandidat memiliki cara hegemoni yang berbeda sesuai dengan target dan kondisi daerah itu.